



RANCANGAN AWAL

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN ANGGARAN 2025

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SINGKAWANG**



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmatNya jualah maka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2025 dapat diselesaikan penyempurnaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana kerja ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tujuan pembangunan Kota Singkawang untuk kurun waktu selama 1 (satu) tahun ke depan, dan dapat lebih memacu gerak dan langkah pada tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa mendatang, sehingga tujuan dan sasaran program/kegiatan/sub kegiatan dapat lebih fokus, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023 - 2026 dalam mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2025 ini kami sampaikan ucapan terima kasih. Demikian Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2025 ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Singkawang, 7 Mei 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika



EVAN ERNANDA, S. Kom

Pembina Tk. I

NIP. 19710312 200502 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi

DAFTAR ISIii

DAFTAR TABELiii

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1. Latar Belakang.....1

1.2. Landasan Hukum3

1.3. Maksud dan Tujuan.....6

1.4. Sistematika Penulisan.....6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2023.....8

.....

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika.....8

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika31

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika31

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD34

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat48

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG49

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional49

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika53

3.3. Program Dan Kegiatan54

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....67

BAB V PENUTUP79

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Faktor Penyebab Program dan Kegiatan yang Mencapai Target9

Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Barat / Kota Singkawang17

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat31

Tabel 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat34

Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat48

Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Provinsi Kalimantan Barat / Kota Singkawang55

Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 202567

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang teknologi komunikasi dan informasi telah mempengaruhi dan membawa implikasi terhadap perubahan dan pembaharuan kehidupan masyarakat, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun Hankam. Sehingga peran informasi dan komunikasi dalam aspek kehidupan sekarang ini sangatlah penting, bahkan para futuristik sebagian besar mempunyai suatu kesepakatan bahwa satu kekuatan terpenting sebagai sumber kekuasaan masa depan adalah informasi.

Selain globalisasi dan perkembangan bidang teknologi komunikasi dan informasi, agenda reformasi di bidang komunikasi dan informasi antara lain telah memberikan dampak meningkatnya secara pesat peranan berbagai media komunikasi dan informasi sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi yang paling efektif. Kini masyarakat telah semakin memahami dan menyadari hak-haknya untuk memperoleh informasi yang benar dan tepat waktu serta sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat sejalan dengan pengembangan demokratisasi sehingga terwujudnya akuntabilitas publik, transparansi dan *good governance*.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang merupakan Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika tentu diharapkan dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang kominfo kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi.

Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang kominfo yang dilaksanakan maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi *e-government* dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Wilayah Pemerintah Kota Singkawang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

E-government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara

penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat. Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua perangkat daerah.

Rencana Kerja (Renja) merupakan suatu dokumen yang dihasilkan dari kegiatan perencanaan strategis. Rencana Kerja (Renja) merupakan suatu petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk bekerja menuju satu tahun ke depan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang berfungsi sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang dalam kurun waktu 1 tahun ke depan. Rencana Kerja (Renja) ini disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2023-2026, analisis atas asupan dari para pemangku kepentingan di tingkat Kota, dan analisis terhadap dinamika perubahan lingkungan baik nasional maupun daerah Kalimantan Barat. Selain itu, Rencana Kerja (Renja) ini juga disusun dengan berpedoman pada rancangan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang 2023-2026, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan Kota Singkawang sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tersebut.

Proses perencanaan kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang tahun 2023 dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Permendagri tersebut mengatur secara rinci tahapan proses perencanaan yang harus dilakukan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tahapan proses perencanaan kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang membentuk susunan dan keanggotaan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) dan memberikan orientasi berupa arahan dan pemahaman mengenai Rencana Kerja (Renja) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang kepada seluruh anggota Tim.
2. Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) yang telah terbentuk menyusun rencana kegiatan ke dalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja Tim.

3. Tim melakukan pengumpulan data dan informasi baik yang bersumber dari internal maupun eksternal Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang berdasarkan daftar data dan informasi yang dibutuhkan. Data dan informasi tersebut kemudian diolah ke dalam bentuk yang sesuai untuk kebutuhan analisis.

Dalam proses penyusunan rencana kerja, suatu organisasi biasanya melibatkan banyak pihak dan menggunakan berbagai sumber dalam menganalisis keadaan organisasi dan kaitannya dengan lingkungan di mana organisasi tersebut berkompetisi. Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini tim melibatkan seluruh pejabat struktural dan sub koordinator dalam organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang untuk memberikan tanggapan dan/atau asupan sebagai evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang dalam 1 tahun terakhir.

Seperti dikemukakan di atas bahwa perencanaan kerja adalah suatu proses dan oleh karena itu ia memiliki masukan, kegiatan, keluaran, dan capaian. Perlu disadari bahwa setiap proses memiliki berbagai kendala. Beberapa elemen dari proses adalah bersifat rutin (berkelanjutan) dan yang lainnya dilaksanakan sebagai proyek yang memiliki awal dan akhir yang definitif selama suatu periode.

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah, dalam hal ini Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang bukanlah suatu dokumen perencanaan yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian integral dari dokumen perencanaan organisasi induknya yaitu Pemerintah Kota Singkawang. Selanjutnya, dokumen perencanaan Kota Singkawang merupakan bagian terintegrasi dari dokumen perencanaan Provinsi Kalimantan Barat, Kementerian dan Lembaga Negara, dan seterusnya hingga perencanaan pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam PP No. 8 Tahun 2008 bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ini menunjukkan bahwa setiap Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya baik secara vertikal maupun horizontal.

Secara vertikal, Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota perangkat daerah disusun berdasarkan rancangan awal Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Kota Singkawang 2023- 2026. Secara horizontal, Rencana Kerja (Renja) ini juga memiliki keterkaitan dengan Rencana Strategis (Renstra) berbagai perangkat daerah yang secara organisatoris berada di bawah Pemerintah Kota Singkawang.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2024 adalah:

- 1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;

- 2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- 12) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 14) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1868);
- 17) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021;
- 18) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2 No. Reg. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat: 2-75/2019);
- 19) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);
- 20) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);
- 21) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 51);
- 22) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Singkawang Tahun 2022-2024 (Lembaran

Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 80);

- 23) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 11.1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026;
- 24) Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang;
- 25) Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang;
- 26) Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 16.1 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Singkawang Tahun 2025;
- 27) Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 061/492/SETDA.OR-A Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub- Subtansi dan Sub Koordinator di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang adalah untuk memberikan pedoman atau landasan dan arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dalam kurun waktu satu tahun ke depan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2025 adalah :

- a. Sebagai panduan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan agar lebih terarah dan berkesinambungan.
- b. Sebagai panduan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahunan agar lebih terarah dan berkesinambungan.
- c. Mewujudkan kesinergian di antara unit-unit kerja atau perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dan para pemangku kepentingan di lingkungan Kota Singkawang perihal program dan kegiatan tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Kota Singkawang Tahun 2025 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum

	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
BAB II	: HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2023
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	: TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika
	3.3. Program dan Kegiatan
	3.4. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tahun 2020-2024 dan Renstra Diskominfo Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
	3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BAB V	: PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2023

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang tahun yang lalu adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Berikut ini disajikan realisasi Renja Dinas Kominfo Kota Singkawang Tahun 2023 dalam tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika dan Pencapaian Renstra SKPD.

2.1.1. Faktor- Faktor Penyebab

a. Faktor Penyebab Program dan Kegiatan yang Mencapai Target

Secara umum yang menjadi faktor penyebab untuk program dan kegiatan yang mencapai target adalah karena program dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Di samping itu sebagian besar kegiatan yang mencapai target adalah kegiatan yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.

Tabel 2.1.
Faktor Penyebab Program dan Kegiatan yang Mencapai Target

NO	URAIAN PROG / KEG / SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	100% 4.560.147.095	100% 4.378.553.465		
A.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100% 51.004.000	100% 49.583.850		
1.	Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen 17.998.900	3 dokumen 17.520.700	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Sub Keg. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen 6.000.000	1 dokumen 5.835.800	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	Sub Keg. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen 3.999.600	1 dokumen 3.922.900	Tidak Ada	Tidak Ada
4.	Sub Keg. Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	1 dokumen 3.999.900	1 dokumen 3.507.950	Tidak Ada	Tidak Ada
5.	Sub Keg. Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	1 dokumen 4.010.500	1 dokumen 3.950.900	Tidak Ada	Tidak Ada
6.	Sub Keg. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 laporan 4.999.600	1 laporan 4.850.100	Tidak Ada	Tidak Ada
7.	Sub Keg. Evaluasi kinerja perangkat daerah	4 laporan 9.995.500	4 laporan 9.995.500	Tidak Ada	Tidak Ada
B.	Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	100% 3.156.856.176	100% 3.026.231.459		
8.	Sub Keg. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	32 orang/bulan 3.012.061.976	32 orang/bulan 2.883.323.659	Tidak Ada	Tidak Ada
9.	Sub Keg. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 dokumen 136.800.000	1 dokumen 135.730.000	Tidak Ada	Tidak Ada
10.	Sub Keg. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	1 dokumen 2.994.600	1 dokumen 2.264.050	Tidak Ada	Tidak Ada
11.	Sub Keg. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan 4.999.600	1 laporan 4.913.750	Tidak Ada	Tidak Ada

C.	Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	100% 349.324.600	100% 341.355.042		
12.	Sub Keg. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	1 paket 19.088.700	1 paket 18.665.472	Tidak Ada	Tidak Ada
13.	Sub Keg. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket 90.504.400	1 paket 87.847.200	Tidak Ada	Tidak Ada
14.	Sub Keg. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 paket 26.527.500	1 paket 22.935.502	Tidak Ada	Tidak Ada
15.	Sub Keg. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 dokumen 3.204.000	1 dokumen 2.340.000	Tidak Ada	Tidak Ada
16.	Sub Keg. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan 210.000.000	1 laporan 209.566.868	Tidak Ada	Tidak Ada
D.	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100% 872.495.119	100% 832.389.074		
17.	Sub Keg. Penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan 3.497.600	1 laporan 1.971.150	Tidak Ada	Tidak Ada
18.	Sub Keg. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya,air dan listrik	1 laporan 208.924.999	1 laporan 189.766.975	Tidak Ada	Tidak Ada
19.	Sub Keg. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 laporan 660.072.520	1 laporan 640.650.949	Tidak Ada	Tidak Ada
E.	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100% 130.467.200	100% 128.994.040		
20.	Sub Keg. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	2 unit 56.703.200	2 unit 55.401.260	Tidak Ada	Tidak Ada
21.	Sub Keg. Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit 73.764.000	1 unit 73.592.780	Tidak Ada	Tidak Ada
II.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	100% 633.806.900	111,74% 629.971.172		
F.	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Komunikasi Publik	100% 633.806.900	100% 629.972.172		
22.	Sub Keg. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 dokumen 3.088.900	1 dokumen 2.967.370	Waktu penetapan peraturan kepala daerah tidak sesuai jadwal	Evaluasi target waktu dengan menyesuaikan dengan tahapan-

				karena harus melewati beberapa tahapan, mengingat kepala daerah belum definitif (Penjabat Wali Kota)	tahapan yang harus dilewati.
23.	Sub Keg. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	300 dokumen 49.634.100	390 dokumen 49.428.250	Tidak Ada	Tidak Ada
24.	Sub Keg. Pengelolaan Media Komunikasi Publik	800 dokumen 552.705.000	936 dokumen 551.529.752	Tidak Ada	Tidak Ada
25.	Sub Keg. Pelayanan Informasi Publik	4 dokumen 28.378.900	4 dokumen 26.045.800	Tidak Ada	Tidak Ada
III.	Program Aplikasi Informatika	45 aplikasi 1.077.574.836	45 aplikasi 1.042.778.235		
G.	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 sub domain 952.714.836	100 sub domain 935.220.935		
26.	Sub Keg. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	85 sub domain 12 server 56.383.000	85 sub domain 12 server 49.574.480	1. Kondisi umur hardware yang sudah tidak layak operasional 2. Penggunaan template/framework gratis yang tidak disadari terdapat banyak backdoor, sehingga website/aplikasi bisa dengan mudah disusupi oleh pihak-pihak	1. Memasukkan program ke RKPd untuk peremajaan hardware 2. Mengupdate framework berlisensi

				kejahatan siber serta Kurang referensi dalam penyusunan kebijakan	
27.	Sub Keg. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	81 unit kerja 896.331.836	81 unit kerja 885.646.455	1. Kurangnya komitmen anggaran untuk pembiayaan jaringan internet OPD dan Kelurahan 2. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM 3. Penggunaan jaringan intranet untuk server yang ada di Kominfo masih dirasa meyulitkan user dalam mengakses ip local	1. Memasukkan usulan ke RKPD jaringan internet dan intranet 2. Pengembangan kompetensi SDM 3. Sosialisasi fungsionalisasi jaringan intra dalam hal keamanan sistem
H.	Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	45 aplikasi 124.860.000	45 aplikasi 107.557.300		
28.	Sub Keg. Koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik	3 perangkat daerah 16.212.400	3 perangkat daerah 16.123.900	1. Perbedaan struktur database, perbedaan bahasa program, API/ endpoint tidak tersedia 2. Kurangnya literasi pemilik proses bisnis untuk memperhatikan	1. Membuat arsitektur SPBE sesuai dengan proses bisnis

				n interoperabilita s data	
29.	Sub Keg. Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	3 Aplikasi 19.803.500	3 Aplikasi 19.782.200	1. Perubahan regulasi dan harus dikembangkan kembali, komitmen untuk menggunakan aplikasi, SDM TIK kurang 2. Kurang memperhatikan kaidah spesifikasi Kebutuhan perangkat lunak, dalam hal memahami proses bisnis manual untuk ditafsirkan dalam use case digital	1. Membuat arsitektur SPBE sesuai proses bisnis dan kebutuhan sistem
30.	Sub Keg. Pengembangan dan pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota cerdas dan Kota Cerdas	1 dokumen 42.053.300	1 dokumen 25.591.900	1. Kolaborasi antar dimensi Smart City oleh Perangkat Daerah kurang aktif	1.Penguatan kolaborasi antar stake holder smart city
31.	Sub Keg. Pengembangan dan pengelolaan sumberdaya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	20 dokumen 42.855.000	20 dokumen 42.185.000	1. Kurangnya SDM dalam mengelola aplikasi	1. <i>Capacity Building</i> SDM TIK 2.Usulan SDM sesuai anjab ABK
32.	Sub Keg. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE	1 dokumen 3.935.800	1 dokumen 3.874.300	1. Rendahnya pemahaman perangkat daerah tentang SPBE 2. Perubahan regulasi	1. Penguatan tim SPBE 2. Sosialisasi SPBE

				dimana paramater yang digunakan dalam pengukuran indeks SPBE bertambah	
IV.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100% 169.045.400	100% 161.608.077		
I.	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	100% 169.045.400	100% 161.608.077		
33.	Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	2 dokumen 31.540.900	2 dokumen 31.051.977	Masih banyak data dan metadata yang dihasilkan oleh produsen data yang belum sesuai prinsip Satu Data Indonesia	Melakukan koordinasi dan asistensi kepada produsen data dalam menyusun data dan metadata sesuai prinsip Satu Data Indonesia.
34.	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	6 orang 47.057.600	6 orang 42.218.250	Masih terbatasnya jumlah SDM yang berkompeten dalam melaksanakan fungsi sebagai Wali Data	Meningkatkan kompetensi SDM selaku Wali Data melalui pelatihan atau Bimtek.
35.	Pengembangan Infrastruktur	3 unit 90.446.900	3 unit 88.337.350	Masih terbatasnya jumlah peralatan yang berkualitas dalam mendukung penyelenggaraan statistik sektoral.	Mengajukan anggaran untuk pengadaan peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang penyelenggaraan statistik sektoral.
V.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	100% 52.810.075	100% 44.781.430		

J.	Kegiatan Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota	100% 52.810.075	100% 44.781.430		
36.	Sub Keg. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	29 laporan 52.810.075	29 laporan 44.781.430	Masih banyaknya user yang mengalami hambatan dalam menggunakan tanda tangan elektronik.	Memberikan bantuan teknis dalam mengatasi permasalahan penggunaan tanda tangan elektronik.

b. Faktor Penyebab Program dan Kegiatan yang Tidak Mencapai Target

Untuk program/kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 sampai dengan berakhirnya periode tahun anggaran atau awal tahun 2024 **tidak ada** kegiatan yang realisasi anggarannya tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut beberapa faktor yang menjadi penghambat pencapaian target, yaitu :

1. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara optimal sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi).
2. Masih terbatasnya jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.
3. Ketercapaian sasaran strategis perspektif *stakeholder* sangat tergantung dari dukungan institusi/lembaga terkait sehingga pelaksanaan tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang saja belum cukup untuk menjadikan realisasi capaian sasaran-sasaran tersebut sesuai atau bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama yang lebih intensif dengan institusi/lembaga terkait lainnya.

2.1.2. Implikasi yang Timbul terhadap Taget Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

Dikarenakan terdapat beberapa program pada tahun akhir 2023 tidak didukung oleh tersedianya anggaran yang memadai dikarenakan terjadinya refocusing anggaran, sehingga target capaian kegiatan tidak mencapai 100% dari yang direncanakan sehingga berimplikasi terhadap tidak tercapainya target capaian Renstra OPD 2023 - 2026. Dengan tidak tercapainya target capaian Renstra OPD 2023 – 2026 sesuai yang direncanakan di tahun pertama pelaksanaan mengakibatkan penambahan target pada penyesuaian target capaian pada Renstra 2023 - 2026.

2.1.3. Kebijakan yang Perlu Diambil Terkait Faktor Penyebab

Berdasarkan pemaparan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target dari program/kegiatan serta implikasi yang akan timbul, maka dapat diambil beberapa kebijakan sebagai berikut :

1. Penyesuaian target capaian pada Tahun Anggaran 2025 dan Renstra 2023 – 2026.
2. Efisiensi alokasi belanja.
3. Penambahan alokasi pagu anggaran untuk kegiatan yang belum mencapai target.

Tabel 2.2.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023
dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Barat / Kota Singkawang

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Progra m dan Kegiat an (Renja Perang kat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.10.01.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10.	Komunikasi Dan Informatika	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.16.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	10,53%
2.16.01.2.01.	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	21,42%
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 dok	2 dok	3 dok	3 dok	100%	1 dok	0	0
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	4 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	0	0

		Dokumen RKA-SKPD								
2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	0	0
2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	0	0
2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	0	0

2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dok	1 dok	1 lap	1 lap	100%	1 lap	1 lap	100%
2.16.01.2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah	16 dok	1 dok	4 lap	4 lap	100%	2 lap	1 lap	50%
2.16.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	31,25%
2.16.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140 orang	100%	32 orang/bulan	32 orang/bulan	100%	35 orang / bulan	35 orang / bulan	25%

2.16.01.2.02.02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 dok	100%	1 dok	1 dok	100%	1 dok	0	0
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 dok	100%	1 dok	1 dok	100%	1 dok	0	0
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 lap	1 dok	1 lap	1 lap	100%	1 lap	1 lap	100%
2.16.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0
2.16.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan	4 paket	100%	1 paket	1 paket	100%	1 paket	0	0

		Kantor yang Disediakan								
2.16.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	100%	1 paket	1 paket	100%	1 paket	0	0
2.16.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	100%	1 paket	1 paket	100%	1 paket	0	0
2.16.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dok	100%	1 dok	1 dok	100%	1 dok	0	0
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 lap	100%	1 lap	1 lap	100%	1 lap	0	0
2.16.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0

		pemerintahan daerah								
2.16.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 lap	100%	1 lap	1 lap	100%	1 lap	0	0
2.16.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya, air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 lap	100%	1 lap	1 lap	100%	1 lap	0	0
2.16.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 lap	100%	1 lap	1 lap	100%	1 lap	0	0
2.16.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0
2.16.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%	2 unit	0	0

	operasional atau lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
2.16.01.2.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%	1 unit	0	0
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Pelaksanaan Program Informasi dan Komunikasi Publik	100%	106%	100%	111,74%	111,74%	100%	0	0
2.16.02.2.01	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik daerah	100%	106%	100%	100%	100%	100%	0	0
2.16.02.2.01.01	Perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi	4 perwako	2 perwako	1 dok	1 dok	100%	1 dok	0	0

		dan Komunikasi Publik								
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1200 dok	337 konten	300 dok	390 dok	130%	300 dok	96 dok	32%
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan media komunikasi publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3200 dok	723 berita	800 dok	936 dok	117%	800 dok	304 dok	38%
2.16.02.2.01.06	Pelayanan informasi publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	16 dok	49 dok	4 dok	4 dok	100%	4 dok	0	0
2.16.02.2.01.10	Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi kebijakan layanan informasi publik	30 PD	0	0	0	0%	85 orang	0	0

2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Penerapan aplikasi e-Government	100%	100%	45 aplikasi	45 aplikasi	100%	50 aplikasi	0	0
2.16.03.2.01	Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain dilingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	100%	100%	100 sub domain	100 sub domain	100%	110 sub domain	0	0
2.16.03.2.02	Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah domain dan subdomain Pemkot Singkawang yang terbangun, Jumlah ruang server yang dirawat	85 sub domain	100%	85 sub domain	85 sub domain	100%	85 sub domain	0	0
2.16.03.2.03	Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra	81 unit kerja	100%	81 unit kerja	81 unit kerja	100%	29 unit	0	0

		Pemerintah Daerah								
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government dilingkup pemerintah daerah kabupaten / kota	Persentase pengelolaan e-government dilingkup pemerintah daerah kabupaten/ kota	100%	101%	45 aplikasi	45 aplikasi	100%	100%	0	0
2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	12 PD	3 aplikasi	3 PD	3 PD	100%	3 PD	0	0
2.16.03.2.02.07	Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	12 aplikasi	3 aplikasi	3 unit	3 aplikasi	100%	3 unit	0	0
2.16.03.2.02.07	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Dimplementasikan sesuai dengan	4 dokumen	0	1 dok	1 dok	100%	1 dok	0	0

		Masterplan Smart City								
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan pengelolaan sumberdaya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	80 dok	18 aplikasi	20 dok	20 dok	100%	20 dok	0	0
2.16.03.2.02.12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	4 dok	2,6	1 dok	1 dok	100%	1 dok	0	0
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase perangkat daerah yang data sektoralnya terintegrasi dengan website Pemerintah Kota Singkawang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup	Persentase Cakupan Data	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0

	Daerah Kabupaten/Kota	Statistik Kota Singkawang								
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	8 dok	2 buku	2 dok	2 dok	100%	1 dok	0	0
	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	9 orang	0	6 orang	6 orang	100%	3 orang	0	0
	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	3 unit	0	3 unit	3 unit	100%	0	0	0
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 dok	0	0	0	0	1 dok	0	0

2.21.02	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PER\$ANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	0	0
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase Penyelenggara an pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0
2.21.02.2.01.01	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berkas Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berkas Elektronik dan Non Elektronik	29 lap	1 dokumen	29 lap	29 lap	100%	1 lap	0	0

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sesuai dengan Rancangan Awal Renstra SKPD Tahun 2023 - 2026, Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Singkawang memiliki 1 (satu) sasaran strategis yang menjadi fokus dalam 4 (empat) tahun ke depan. Dalam hal kinerja pelayanan sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Indeks SPBE Pemerintah Kota Singkawang	-	-	2,65 (Baik)	3,34 (Baik)	3,35 (Baik)	3,36 (Baik)	3,33 (Baik)	Belum Ada	3,35 (Baik)	3,36 (Baik)	-

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Untuk dapat lebih memfokuskan strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang dalam pencapaian visi, misi secara efektif dan efisien, perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi.

Analisa tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam bentuk isu-isu strategis. Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dalam bentuk review pencapaian kinerja Dinas

Kota Singkawang dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan yang telah dilakukan telah berjalan dengan baik, namun demikian sebagaimana pada umumnya yang terjadi pada pelayanan Pemerintahan Daerah tetap mendapatkan atau menemui berbagai macam persoalan atau hambatan yang sangat krusial dalam pengembangan teknologi komunikasi dan informasi. Adapun hal tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Kurangnya kualitas serta kuantitas SDM bidang kominfo, statistik, dan persandian;
- 2) Sarana dan Prasarana pendukung yang kurang memadai;
- 3) Masih terbatasnya upaya diseminasi informasi mengenai kebijakan dan hasil pembangunan khususnya melalui media massa lokal maupun jaringan nasional;
- 4) Perlunya analisis berbasis teknologi terhadap berita dan informasi yang berkembang di media cetak, elektronik, maupun sosial;
- 5) Pelaksanaan sosialisasi hasil pembangunan melalui FK Metra belum optimal;
- 6) Kurangnya pembinaan pemerintah terhadap Kelompok Informasi Masyarakat maupun Lembaga Komunikasi Masyarakat;
- 7) Perlunya optimalisasi peran dan fungsi Kelompok Informasi Masyarakat maupun Lembaga Komunikasi Masyarakat;
- 8) Perlunya peningkatan hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan para pelaku jurnalistik;
- 9) Perlunya peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD dalam pembangunan jaringan dan aplikasi yang terintegrasi;
- 10) Kurangnya pedoman pengelolaan informasi dan komunikasi berklasifikasi;
- 11) Lemahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan dan pelayanan informasi serta keterbukaan informasi publik;
- 12) Validasi, pemanfaatan, pengelolaan dan *updating* data statistik sektoral yang belum optimal;
- 13) Pembangunan aplikasi dengan *platform* dan struktur berbeda;
- 14) Pengelolaan pusat *application protocol interface* belum optimal;
- 15) Belum adanya data center;
- 16) Pengelolaan jaringan internet dan intranet belum optimal;
- 17) Integrasi Sistem Informasi belum tercapai;
- 18) Kurangnya pedoman teknis terkait *E-Government*;
- 19) Keterbatasan peralatan pendukung utama dan wajib persandian.

Berdasarkan hal tersebut tentunya akan berdampak kepada upaya pencapaian optimalisasi pada pelayanan komunikasi dan informasi yang ada di wilayah Kota Singkawang. Adapun isu yang dapat dimunculkan untuk pembangunan pada tahun 2023 berdasarkan permasalahan yang dianggap krusial tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan peningkatan fasilitas pendukung informasi dan komunikasi melalui media teknologi

secara bertahap dan menyeluruh.

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia informasi dan teknologi yang memiliki kompetensi yang tidak hanya dapat menggunakan akan tetapi juga mampu untuk merancang, melakukan evaluasi metode, dan memanfaatkan informasi dan teknologi beserta pendukungnya sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada.
3. Meningkatkan sistem layanan pemerintahan yang terintegrasi dan mampu menciptakan sistem teknologi informasi daerah yang telah disesuaikan dengan keberadaan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sekaligus sebagai wujud dari pelayanan prima Pemerintah Kota Singkawang kepada masyarakat.
4. Pembentukan suatu kebijakan yang kuat dalam memberikan dukungan kepada pengimplementasian *e-Government* yang didasarkan kepada penguatan koordinasi secara kelembagaan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, dan penyediaan aplikasi beserta perencanaannya yang dilakukan dengan penilaian secara berkala.
5. Pemanfaatan jaringan Internet untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, tegas, amanah dan efektif yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Tabel 2.4.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Singkawang	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	5.366.585.493,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Singkawang	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	6.404.554.176,00	-
A	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja	Singkawang	Persentase Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja	100%	49.500.000,00	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja	Singkawang	Persentase Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja	100%	63.000.000,00	-

	Perangkat Daerah		Perangkat Daerah			Perangkat Daerah		Perangkat Daerah			
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Singkawang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 dok	15.000.000,00	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Singkawang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 dok	15.000.000,00	-
2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Singkawang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	6.000.000,00	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Singkawang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	10.000.000,00	-
3	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Singkawang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	4.000.000,00	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Singkawang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	6.000.000,00	-
4	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Singkawang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	4.000.000,00	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Singkawang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	6.000.000,00	-
5	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Singkawang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 dok	4.000.000,00	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Singkawang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 dok	6.000.000,00	-

			Perubahan DPA-SKPD					Perubahan DPA-SKPD			
6	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Singkawang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dok	6.500.000,00	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Singkawang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dok	8.000.000,00	-
7	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Singkawang	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah	1 dok	10.000.000,00	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Singkawang	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah	4 dok	12.000.000,00	-
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Singkawang	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.579.684.424,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Singkawang	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4.054.713.000,00	-
8	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Singkawang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 orang	3.437.854.424,00	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Singkawang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 orang	3.900.000.000,00	-
9	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	128.830.000,00	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	141.713.000,00	-
10	Pelaksanaan penatausahaan	Singkawang	Jumlah Dokumen Penatausahaan	1 dok	6.500.000,00	Pelaksanaan penatausahaan	Singkawang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	100%	5.000.000,00	-

	dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD		dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD			dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
11	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Singkawang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dok	6.500.000,00	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Singkawang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dok	8.000.000,00	-
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Singkawang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	8.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Singkawang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	10.000.000,00	
12	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Singkawang	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	1 dok	4.000.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Singkawang	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	1 dok	5.000.000,00	
13	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Singkawang	Cakupan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	100%	4.000.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Singkawang	Cakupan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	100%	5.000.000,00	
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Singkawang	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	25.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Singkawang	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	32.000.000,00	

14	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Singkawang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	25.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Singkawang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	32.000.000,00	
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Singkawang	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100%	692.768.391,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Singkawang	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100%	832.045.230,00	
15	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Singkawang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	13.036.640,00	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Singkawang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	14.340.304,00	-
16	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Singkawang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	351.461.681,00	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Singkawang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	386.607.849,00	-
17	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Singkawang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	25.480.070,00	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Singkawang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100%	28.028.077,00	-
18	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Singkawang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	2.790.000,00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Singkawang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100%	3.069.000,00	-
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Singkawang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	300.000.000,00	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Singkawang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	400.000.000,00	-

F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Singkawang	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Singkawang	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	300.000.000,00	0
20	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Singkawang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 unit	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Singkawang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit mobil	300.000.000,00	
G	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Singkawang	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	892.831.783,00	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Singkawang	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	982.114.961,00	-
21	Penyediaan jasa surat menyurat	Singkawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	4.179.680,00	Penyediaan jasa surat menyurat	Singkawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	4.597.648,00	-
22	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Singkawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	239.506.750,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Singkawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	263.457.425,00	-
23	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Singkawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	649.145.353,00	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Singkawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	714.059.888,00	-

H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Singkawang	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	118.800.895,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Singkawang	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	130.680.985,00	-
24	Peyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perzinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Singkawang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	53.054.150,00	Peyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perzinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Singkawang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	58.359.565,00	-
25	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Singkawang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	65.746.745,00	Pemeliharaa/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Singkawang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	77 Unit	72.321.420,00	-
II	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Singkawang	Persentase Pelaksanaan Program Informasi Dan Komunikasi Publik	100%	464.952.792,00	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Singkawang	Persentase Pelaksanaan Program Informasi Dan Komunikasi Publik	100%	464.952.792,00	-
I	Pengelolaan informasi dan	Singkawang	Persentase Pengelolaan	100%	464.952.792,00	Pengelolaan informasi dan	Singkawang	Persentase Pengelolaan	100%	464.952.792,00	-

	komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/ kota		Informasi Dan Komunikasi Publik Daerah			komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/ kota		Informasi Dan Komunikasi Publik Daerah			
26	Relasi Media	Singkawang	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	6 Lap	12.465.200,00	Relasi Media	Singkawang	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	6 Lap	12.465.200,00	-
27	Pelayanan Informasi Publik	Singkawang	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	50 Permohonan	148.190.240,00	Pelayanan Informasi Publik	Singkawang	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	50 Permohonan	148.190.240,00	
28	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini,	Singkawang	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu	4 Rekomendasi	6.523.332,00	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini,	Singkawang	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik	4 Rekomendasi	6.523.332,00	-

	dan Aspirasi Publik		publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah			dan Aspirasi Publik		yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah			
29	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Singkawang	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	12 Media	192.247.400,00	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Singkawang	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	12 Media	192.247.400,00	-
30	Penyusunan Konten	Singkawang	Jumlah Konten Informasi Publik	400 Konten	25.026.620,00	Penyusunan Konten	Singkawang	Jumlah Konten Informasi Publik	400 Konten	25.026.620,00	-
31	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Singkawang	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	6 Orang	25.026.620,00	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Singkawang	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	6 Orang	25.026.620,00	-
III	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Singkawang	Persentase Penerapan aplikasi e-Government	100%	940.751.863,00	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Singkawang	Persentase Penerapan aplikasi e-Government	100%	1.855.706.658,00	-

J	Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapka Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Singkawang	Persentase Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	72.481.780,00	Pengelolaan nama domain yang telah ditetapka oleh pemerintah pusat dan sub domain dilingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	Singkawang	Persentase Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	220.500.000,00	-
32	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Singkawang	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	100 Dok	72.481.780,00	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Singkawang	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	100 Dok	220.500.000,00	-
K	Pengelolaan E-Government Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaen/ Kota	Singkawang	Persentase Pengelolaan E-Goverment Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	868.270.083,00	Pengelolaan E-Government Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota	Singkawang	Persentase Pengelolaan E-Goverment Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%		-
33	Fasilitasi penyelenggaraan	Singkawang	Jumlah laporan hasil fasilitasi	20 Lap	32.139.200,00	Fasilitasi penyelenggaraan	Singkawang	Jumlah laporan hasil fasilitasi	20 Lap	32.139.200,00	-

	SPBE di lingkungan Pemda		penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda			SPBE di lingkungan Pemda		penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda			
34	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Singkawang	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	1 Dok	3.816.560,00	Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	Singkawang	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	3 aplikasi	3.816.560,00	-
35	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Singkawang	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	3 dok	27.562.500,00	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Singkawang	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	3 dok	27.562.500,00	
36	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Singkawang	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerahPemerintah Daerah	3 Aplikasi	19.975.520,00	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Singkawang	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerahPemerintah Daerah	3 Aplikasi	19.975.520,00	-
37	Penyelenggaraan Jaringan Intra	Singkawang	Jumlah perangkat daerah di pemerintah	30 PD	752.287.733,00	Penyelenggaraan Jaringan Intra	Singkawang	Jumlah perangkat daerah di pemerintah	30 PD	1.260.094.158,00	

	Pemerintah Daerah Kab/Kota		Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota			Pemerintah Daerah Kab/Kota		Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota			
38	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Singkawang	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	2 Prog	32.488.570,00	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Singkawang	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	2 Prog	32.488.570,00	
IV	PROGRAM PENYELENGGA RAAN STATISTIK SEKTORAL	Singkawang	Persentase Perangkat Daerah Yang Data Sektoralnya Terintegrasi Dengan Website	100%	178.537.452,00	PROGRAM PENYELENGGA RAAN STATISTIK SEKTORAL	Singkawang	Persentase Perangkat Daerah Yang Data Sektoralnya Terintegrasi Dengan Website	100%	178.537.452,00	-
L	Penyelenggara n Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Singkawang	Persentase Cakupan Data Statistik Kota Singkawang	100%	178.537.452,00	Penyelenggara n Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Singkawang	Persentase Cakupan Data Statistik Kota Singkawang	100%	178.537.452,00	-
39	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Singkawang	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	6 Orang	50.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Singkawang	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	6 Orang	50.000.000,00	

40	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Singkawang	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100%	128.537.452,00	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Singkawang	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100%	128.537.452,00	
V	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PER\$ANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Singkawang	Persentase Perangkat Daerah Yang Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	100%	100.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PER\$ANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Singkawang	Persentase Perangkat Daerah Yang Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	100%	500.000.000,00	-
M	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah daerah kabupaten/kota	Singkawang	Persentase Penyelenggara n Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100.000.000,00	Penyelenggara n Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah daerah kabupaten/kota	Singkawang	Persentase Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100.000.000,00	-

41	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Singkawang	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 dok	25.000.000,00	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Singkawang	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 dok	25.000.000,00	
42	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Singkawang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Lap	75.000.000,00	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Singkawang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Lap	75.000.000,00	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pada rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2024, tidak ada usulan program/kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota. Berikut disajikan tabel usulan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2024 dari para pemangku kepentingan :

Tabel 2.5.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
Tidak Ada Usulan					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arah kebijakan rencana kerja pemerintah tahun 2024 bertema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan yang terdiri dari :

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. Revitalisasi industry dan penguatan riset terapan
3. Pembangunan rendah karbon dan transisi energy
4. Percepatan pembangunan ibu kota nusantara
5. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
6. Penguatan daya saing usaha
7. Percepatan pembangunan infrasturktur dasar dan konektivitas
8. Pelaksanaan pemilu 2024

3.1.1 TELAAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023-2026

Telaah terhadap RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026, adalah sebagai berikut :

- 1) Pada RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 telah ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator pencapaian pembangunan Kota Singkawang yang terdiri dari 15 tujuan, 25 sasaran dan 45 indikator kinerja sasaran.
- 2) Untuk efektifitas pelaksanaan pembangunan Kota Singkawang Tahun 2023-2026 pada RPD telah dirumuskan arah pembangunan Kota Singkawang dan rumusan program pembangunan sebanyak 93 program, disertai dengan pagu indikatif dan indikator capaian target pada setiap tahunnya yang tersebar di seluruh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Penjabaran RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 untuk setiap tahunnya disusun melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

3.1.2 TELAAHAN RENJA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2024 DAN RENJA DISKOMINFO PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 – 2023

3.1.2.1 TELAAHAN RENJA KEMENTERIAN KOMUNIKASI, INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2024

Indonesia memiliki kekuatan yang besar untuk kembali bangkit dengan memaksimalkan segenap kekuatan sumber daya bangsa untuk tumbuh menjadi negara besar, khususnya melalui digitalisasi nasional. Infrastruktur TIK sebagai landasan utama menuju digitalisasi nasional, harus dijamin untuk dapat dinikmati hingga ke

seluruh pelosok, sehingga berbagai aplikasi dan konten yang baik dapat diakses dan dimanfaatkan masyarakat. Dalam upaya menuntaskan infrastruktur TIK, Kemenkominfo memprioritaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik. Selain itu mempercepat digitalisasi penyiaran (*analog switch off*), *farming* dan *refarming* frekuensi untuk menyediakan layanan internet cepat dan berkualitas, dan menyiapkan rencana implementasi teknologi 5G nasional.

Penuntasan infrastruktur TIK akan diselaraskan dengan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) talenta digital dan ekosistem ekonomi digital, antara lain dengan pelatihan SDM digital, percepatan transformasi digital pada sektor-sektor ekonomi dan bisnis, dan pengembangan *startup* digital. Dari sisi pemerintahan dan pelayanan publik, Kemenkominfo akan melaksanakan transformasi digital pemerintahan, antara lain dengan mempercepat pembangunan dan pemanfaatan Pusat Data Nasional menuju Satu Data Indonesia, dan mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sebagai regulator, Kemenkominfo mendorong penyelesaian kebijakan dan regulasi terkait TIK baik yang berupa undang-undang, peraturan Presiden, ataupun peraturan menteri, dengan meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.

Untuk menjalankan fungsi koordinasi komunikasi publik, Kemenkominfo akan melakukan orkestrasi pengelolaan komunikasi publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah. Hal ini diupayakan dengan membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir, serta membangun tim yang solid untuk diseminasi kebijakan pemerintah dan responsif dalam mengkonter hoaks.

Terakhir, pada upaya peningkatan kualitas tata kelola manajemen internal, akan dilakukan peningkatan kompetensi SDM internal, penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja, serta mendorong inovasi dalam perencanaan penganggaran, seperti dalam merancang skema pembiayaan program atau proyek strategis.

3.1.2.2 TELAAHAN RENJA DISKOMINFO PROPINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023

Berdasarkan kondisi Kalimantan Barat saat ini serta visi, misi, dan arah pembangunan yang tercantum dalam RPJPD tahun 2005-2025, maka visi pembangunan daerah tahun 2019–2023 yang akan direalisasikan adalah:

***“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN
BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN
PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN”***

Visi tersebut akan diwujudkan melalui enam Misi Pembangunan Daerah Kalimantan Barat. Di antara misi yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang.

Tugas dan Fungsi Diskominfo

Sesuai dengan Peraturan Gubernur nomor 71 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan program kerja di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
- b. perumusan kebijakan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
- d. pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
- g. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
- h. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.1.2.3 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Dari uraian tersebut diatas dijelaskan bahwa kecenderungan penurunan kualitas lingkungan terkait dengan tata ruang wilayah, sebagai produk dari rangkaian proses wilayah, menjadi mutlak dan strategis untuk segera direalisasikan guna menghambat laju penurunan kualitas lingkungan dan daya dukung Lingkungan. Oleh karena itu perlu penghitungan daya dukung dan daya tampung lahan guna untuk memperbaiki Kualitas RTRW melalui perbaikan kerangka berpikir perencanaan tata ruang, yang berimplikasi pada perbaikan prosedur /proses dan metodologi / muatan perencanaan.

Faktor-faktor pendorong dalam pelayanan Perangkat Daerah terhadap implikasi RT RW dan Lingkungan adalah sebagai berikut :

- 1) Tersedianya arah pengembangan kawasan/wilayah sebagaimana RT RW, dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan dan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan kota;
- 2) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup;
- 3) Pemberdayaan SDM dan SDA Kota Singkawang yang terus dilakukan.

Sedangkan faktor-faktor penghambat antara lain :

- 1) Perubahan alih fungsi lahan yang tidak memperhatikan RT RW;
- 2) Pembangunan wilayah/kawasan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan;
- 3) Belum optimalnya publikasi informasi rencana kawasan/wilayah;
- 4) Masih lemahnya tindak pengawasan dan pelaksanaan sanksi terhadap bentuk pelanggaran.

3.1.2.4 TELAAH RTRW KOTA SINGKAWANG 2021-2041

Penyusunan RPD Tahun 2023-2026 berpedoman pada tujuan RTRW Kota Singkawang 2021-2041, yaitu penataan ruang wilayah Kota Singkawang sebagai pusat kegiatan wilayah yang memiliki keunggulan pariwisata berwawasan lingkungan hidup, kegiatan industri serta perdagangan dan jasa berorientasi ekspor yang aman, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan dengan menyusun kebijakan dan strategi penataan ruang yang terdiri atas:

- a. Pengembangan kawasan pusat kegiatan wilayah yang mencakup

- kawasan pemerintahan, pariwisata budaya, perdagangan dan jasa untuk mendukung perwujudan kota sebagai kota wisata unggulan;
- b. Pengembangan pusat pelayanan yang merata dan berhirarki untuk peningkatan pelayanan ke seluruh wilayah;
 - c. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan lainnya yang terpadu dan merata;

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tujuan merupakan penjabaran atau implemtasi dari pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagai kondisi akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun. Penetapan tujuan disusun dengan mengacu pada sasaran pembangunan Kota Singkawang sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2023-2026, sehingga rumusan tujuan Renstra Perangkat Daerah harus dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasan dengan sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada RPJMD Kota Singkawang, sesuai dengan tugas dan kewenangan Perangkat Daerah.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan dalam rangka pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Adapun tujuan utama dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang adalah Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan fungsi pelayanan publik dan berbasis inovasi dan teknologi informasi. Untuk mencapai tujuan utama tersebut dijabarkan dalam beberapa tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan fungsi pelayanan publik dan berbasis inovasi dan teknologi informasi.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, didukung melalui pencapaian sasaran :

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan indikator sasaran :

- 1) Indeks SPBE Pemerintah Kota Singkawang.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Kerja Tahun 2025 terdiri dari 1 program rutin yaitu Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri dari 7 kegiatan dan 24 sub kegiatan serta 4 program penunjang Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian yaitu Program informasi dan komunikasi publik yang terdiri dari 1 kegiatan dan 6 sub kegiatan, Program aplikasi informatika yang terdiri dari 2 kegiatan dan 7 sub kegiatan, Program penyelenggaraan statistik sektoral yang terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, dan Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi yang terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan.

Kebutuhan dana/pagu indikatif untuk rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2025 adalah sebesar Rp. **7.050.827.600,00**.

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Provinsi Kalimantan Barat / Kota Singkawang

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Singkawang	100%	5.366.585.493,00	APBD Kota	-	100%	6.130.400.000,00
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi	Singkawang	100%	49.500.000,00	APBD Kota	-	100%	69.100.000,00

		Kinerja Perangkat Daerah							
2.16.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Singkawang	1 dok	15.000.000,00	APBD Kota	-	1 dok	16.500.000,00
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Singkawang	1 dok	6.000.000,00	APBD Kota	-	1 dok	11.000.000,00
2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Singkawang	1 dok	4.000.000,00	APBD Kota	-	1 dok	6.600.000,00
2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Singkawang	1 dok	4.000.000,00	APBD Kota	-	1 dok	6.600.000,00
2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Singkawang	1 dok	4.000.000,00	APBD Kota	-	1 dok	6.600.000,00

2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Singkawang	1 dok	6.500.000,00	APBD Kota	-	1 dok	8.800.000,00
2.16.01.2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah	Singkawang	1 dok	10.000.000,00	APBD Kota	-	1 dok	13.000.000,00
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Singkawang	100%	3.579.684.424,00	APBD Kota	-	100%	3.854.000.000,00
2.16.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Singkawang	35 orang	3.437.854.424,00	APBD Kota	-	35 orang	3.700.000.000,00
2.16.01.2.02.02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Singkawang	100%	128.830.000,00	APBD Kota	-	100%	140.000.000,00
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Singkawang	1 dok	6.500.000,00	APBD Kota	-	1 dok	7.000.000,00
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	Singkawang	1 dok	6.500.000,00	APBD Kota	-	1 dok	7.000.000,00

		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Singkawang	100%	8.000.000,00	APBD Kota	-	100%	8.800.000,00
2.16.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	Singkawang	1 dok	4.000.000,00	APBD Kota	-	1 dok	4.400.000,00
2.16.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Singkawang	100%	4.000.000,00	APBD Kota	-	100%	4.400.000,00
2.16.01.2.05	Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	Singkawang	100%	25.000.000,00	APBD Kota	-	100%	27.500.000,00
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Singkawang	1 Paket	25.000.000,00	APBD Kota	-	1 Paket	27.500.000,00
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	Singkawang	100%	692.768.391,00	APBD Kota	-	100%	761.500.000,00
2.16.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan	Singkawang	1 paket	13.036.640,00	APBD Kota	-	1 paket	14.500.000,00

		Bangunan Kantor yang Disediakan							
2.16.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Singkawang	1 paket	351.461.681,00	APBD Kota	-	1 paket	386.000.000,00
2.16.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Singkawang	1 paket	25.480.070,00	APBD Kota	-	1 paket	28.000.000,00
2.16.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Singkawang	1 dokumen	2.790.000,00	APBD Kota	-	1 dokumen	3.000.000,00
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Singkawang	1 laporan	300.000.000,00	APBD Kota	-	1 laporan	330.000.000,00
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Singkawang	100%	0	APBD Kota	-	100%	300.000.000,00
2.16.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Singkawang	0 unit	0	APBD Kota	-	1 unit	300.000.000,00
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Singkawang	100%	892.831.783,00	APBD Kota	-	100%	980.500.000,00 0

2.16.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Singkawang	1 laporan	4.179.680,00	APBD Kota	-	1 laporan	4.500.000,00
2.16.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Singkawang	1 laporan	239.506.750,00	APBD Kota	-	1 laporan	263.000.000,00
2.16.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Singkawang	1 laporan	649.145.353,00	APBD Kota	-	1 laporan	713.000.000,00
2.16.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Singkawang	100%	118.800.895,00	APBD Kota	-	100%	129.000.000,00
2.16.01. 2.09.02	Peyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perzinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Singkawang	2 unit	53.054.150,00	APBD Kota	-	2 unit	58.000.000,00
2.16.01. 2.09.11	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Singkawang	1 unit	65.746.745,00	APBD Kota	-	1 unit	71.000.000,00

2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Pelaksanaan Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Singkawang	100%	464.952.792,00	APBD Kota	-	100%	794.500.000,00
2.16.02.2.01	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/ kota	Persentase Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Daerah	Singkawang	100%	464.952.792,00	APBD Kota	-	100%	569.500.000,00
2.16.02.2.01.014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Singkawang	6 Lap	12.465.200,00	APBD Kota	-	6 Lap	22.000.000,00
2.16.02.2.01.017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Singkawang	50 Permohonan	148.190.240,00	APBD Kota	-	50 Permohonan	110.000.000,00
2.16.02.2.01.019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Singkawang	4 Rekomendasi	6.523.332,00	APBD Kota	-	4 Rekomendasi	27.500.000,00
2.16.02.2.01.021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah	Singkawang	12 Media	192.247.400,00	APBD Kota	-	12 Media	300.000.000,00

		daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis							
2.16.02.2.01.023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Singkawang	400 Konten	25.026.620,00	APBD Kota	-	400 Konten	55.000.000,00
2.16.02.2.01.024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Singkawang	6 Orang	25.026.620,00	APBD Kota	-	6 Orang	55.000.000,00
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Penerapan aplikasi e-Government	Singkawang	100%	940.751.863,00	APBD Kota	-	100%	1.846.000.000,00
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapka Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Singkawang	100%	72.481.780,00	APBD Kota	-	100%	30.000.000,00

2.16.03.2.01.04	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Singkawang	100 Dok	72.481.780,00	APBD Kota	-	100 Dok	30.000.000,00
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-Government Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaen/ Kota	Persentase Pengelolaan E-Goverment Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Singkawang	100%	868.270.083,00	APBD Kota	-	100%	1.816.000.000,00
2.16.03.2.02.15	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Singkawang	20 Lap	32.139.200,00	APBD Kota	-	20 Lap	125.000.000,00
2.16.03.2.02.18	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	Singkawang	1 Dok	3.816.560,00	APBD Kota	-	1 Dok	73.000.000,00
2.16.03.2.02.19	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Singkawang	3 dok	27.562.500,00	APBD Kota	-	3 dok	30.000.000,00
2.16.03.2.02.20	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta	Singkawang	3 Aplikasi	19.975.520,00	APBD Kota	-	3 Aplikasi	73.000.000,00

	peta rencana SPBE pemerintah daerah	rencana SPBE pemerintah daerahPemerintah Daerah							
2.16.03.2.02.24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Singkawang	30 PD	752.287.733,00	APBD Kota	-	30 PD	1.400.000.000,00
2.16.03.2.02.27	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	Singkawang	2 Prog	32.488.570,00	APBD Kota	-	2 Prog	115.000.000,00
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah Yang Data Sektoralnya Terintegrasi Dengan Website	Singkawang	100%	178.537.452,00	APBD Kota	-	100%	240.000.000,00
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Data Statistik Kota Singkawang	Singkawang	100%	178.537.452,00	APBD Kota	-	100%	240.000.000,00
2.20.02.2.01.07	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Singkawang	6 Orang	50.000.000,00	APBD Kota	-	6 Orang	110.000.000,00

2.20.02.2.01.08	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Singkawang	100%	128.537.452,00	APBD Kota	-	100%	130.000.000,00
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERJANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah Yang Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Singkawang	100%	100.000.000,00	APBD Kota	-	100%	110.000.000,00
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Perjandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Singkawang	100%	100.000.000,00	APBD Kota	-	100%	110.000.000,00
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Singkawang	1 dok	25.000.000,00	APBD Kota	-	1 dok	50.000.000,00

		Kabupaten/Kota yang Ditetapkan							
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Singkawang	1 Lap	75.000.000,00	APBD Kota	-	1 Lap	60.000.000,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Tabel 4.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG TAHUN 2025

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RPD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2024	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL / DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	5.366.585.493,00	Singkawang	APBD KOTA	DAERAH	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang	6.130.400.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	49.500.000,00	Singkawang	APBD KOTA	DAERAH	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang	69.100.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang
2.16.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 dok	3 dok	1 dok	1 dok	15.000.000,00	Singkawang	APBD KOTA	DAERAH	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang	16.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	4 dok	1 dok	1 dok	1 dok	6.000.000,00	Singkawang	APBD KOTA	DAERAH	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang

		Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									Kota Singkawang		
2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 dok	1 dok	1 dok	1 dok	4.000.000,00	Singkawang	APBD KOTA	DAERAH	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang	6.600.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang
2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 dok	1 dok	1 dok	1 dok	4.000.000,00	Singkawang	APBD KOTA	DAERAH	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang	6.600.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang
2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 dok	1 dok	1 dok	1 dok	4.000.000,00	Singkawang	APBD KOTA	DAERAH	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang	6.600.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dok	1 lap	1 lap	1 dok	6.500.000,00	Singkawang	APBD KOTA	DAERAH	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang	8.800.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang

2.16.01.2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah	16 dok	4 lap	2 lap	1 dok	10.000.000,00	Singkawang	APBD KOTA	DAERAH	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang	13.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	3.579.684.424,00	Singkawang	APBD KOTA	DAERAH	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang	3.854.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang
2.16.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140 orang	32 orang/ bulan	35 orang / bulan	35 orang	3.437.854.424,00	Singkawang	APBD KOTA	DAERAH	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang	3.700.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang
2.16.01.2.02.02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 dok	1 dok	1 dok	100%	128.830.000,00	Singkawang	APBD KOTA	DAERAH	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang	140.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	4 dok	1 dok	1 dok	1 dok	6.500.000,00	Singkawang	APBD KOTA	DAERAH	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang	7.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 lap	1 lap	1 lap	1 dok	6.500.000,00	Singkawang	APBD KOTA	DAERAH	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang	7.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada	Cakupan Pelaksanaan Administrasi	100%	100%	100%	100%	8.000.000,00	Singkawang	APBD KOTA	DAERAH	Dinas Komunikasi dan	8.800.000,00	

	Perangkat Daerah	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									Informatika Kota Singkawang		
2.16.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	3 lap	1 paket	1 paket	1 dok	4.000.000,00	Singkawang	APBD KOTA	DAERAH	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang	4.400.000,00	
2.16.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	100%	1 paket	1 paket	100%	4.000.000,00	Singkawang	APBD KOTA	DAERAH	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang	4.400.000,00	
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	1 paket	1 paket	100%	25.000.000,00	Singkawang	APBD KOTA	DAERAH	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang	27.500.000,00	
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	170 paket	1 dok	1 dok	1 Paket	25.000.000,00	Singkawang	APBD KOTA	DAERAH	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang	27.500.000,00	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100%	1 lap	1 lap	100%	692.768.391,00	Singkawang	APBD KOTA	DAERAH	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang	761.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang
2.16.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	100%	100%	1 paket	13.036.640,00	Singkawang	APBD KOTA	DAERAH	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang	14.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang

2.16.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	1 lap	1 lap	1 paket	351.461.681,00	Singkawang	APBD KOTA	DAERAH	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang	386.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang
2.16.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	1 lap	1 lap	1 paket	25.480.070,00	Singkawang	APBD KOTA	DAERAH	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang	28.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang
2.16.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dok	1 lap	1 lap	1 dokumen	2.790.000,00	Singkawang	APBD KOTA	DAERAH	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang	3.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 lap	100%	100%	1 laporan	300.000.000,00	Singkawang	APBD KOTA	DAERAH	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang	330.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	2 unit	2 unit	100%	0	Singkawang	APBD KOTA	DAERAH	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang	300.000.000,00	
2.16.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	1 unit	1 unit	0 unit	0	Singkawang	APBD KOTA	DAERAH	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang	300.000.000,00	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	892.831.783,00	Singkawang	APBD KOTA	DAERAH	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang	980.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang

		Daerah									Singkawang		Singkawang
2.16.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 lap	100%	100%	1 laporan	4.179.680,00	Singkawang	APBD KOTA	DAERAH	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang	4.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang
2.16.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 lap	100%	100%	1 laporan	239.506.750,00	Singkawang	APBD KOTA	DAERAH	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang	263.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang
2.16.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 lap	100 %	100 %	1 laporan	649.145.353,00	Singkawang	APBD KOTA	DAERAH	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang	713.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang
2.16.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peresentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	118.800.895,00	Singkawang	APBD KOTA	DAERAH	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang	129.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang
2.16.01. 2.09.02	Peyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perzinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	100%	100%	2 unit	53.054.150,00	Singkawang	APBD KOTA	DAERAH	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang	58.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang
2.16.01. 2.09.11	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	1 unit	200%	200%	1 unit	65.746.745,00	Singkawang	APBD KOTA	DAERAH	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang	71.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang

	gedung kantor atau bangunan lainnya	Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi									Singkawang		
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Pelaksanaan Program Informasi Dan Komunikasi Publik	100%			100%	464.952.792,00	Singkawang	APBD KOTA	DAERAH	Pemerintah Kota Singkawang	794.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang
2.16.02.2.01	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/ kota	Presentase Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Daerah	817.247.696,00			100%	464.952.792,00	Singkawang	APBD KOTA	DAERAH	Pemerintah Kota Singkawang	569.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang
2.16.02.2.01.014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	17.097.100,00			6 Lap	12.465.200,00	Singkawang	APBD KOTA	DAERAH	Pemerintah Kota Singkawang	22.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang
2.16.02.2.01.017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	53.711.147,00			50 Permohonan	148.190.240,00	Singkawang	APBD KOTA	DAERAH	Pemerintah Kota Singkawang	110.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang
2.16.02.2.01.019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda	55.112.500,00			4 Rekomendasi	6.523.332,00	Singkawang	APBD KOTA	DAERAH	Pemerintah Kota Singkawang	27.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang

		komunikasi prioritas Pemerintah Daerah											
2.16.02.2.01.02 1	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	367.372.900,00			12 Media	192.247.400,00	Singkawang	APBD KOTA	DAERAH	Pemerintah Kota Singkawang	300.000.000,00	Dinas Komunikasidan Informatika Kota Singkawang
2.16.02.2.01.02 3	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	262.000.000,00			400 Konten	25.026.620,00	Singkawang	APBD KOTA	DAERAH	Pemerintah Kota Singkawang	55.000.000,00	Dinas Komunikasidan Informatika Kota Singkawang
2.16.02.2.01.02 4	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	12.465.200,00			6 Orang	25.026.620,00	Singkawang	APBD KOTA	DAERAH	Pemerintah Kota Singkawang	55.000.000,00	Dinas Komunikasidan Informatika Kota Singkawang
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Penerapan aplikasi e- Government	1.843.739.037,00			100%	940.751.863,00	Singkawang	APBD KOTA	DAERAH	Pemerintah Kota Singkawang	1.846.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.496.643.382,00			100%	72.481.780,00	Singkawang	APBD KOTA	DAERAH	Pemerintah Kota Singkawang	30.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang

2.16.03.2.01.04	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	210.000.000,00			100 Dok	72.481.780,00	Singkawang	APBD KOTA	DAERAH	Pemerintah Kota Singkawang	30.000.000,00	Dinas Komunikasidan Informatika Kota Singkawang
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-Government Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaen/ Kota	Persentase Pengelolaan E-Goverment Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	357.250.000,00			100%	868.270.083,00	Singkawang	APBD KOTA	DAERAH	Pemerintah Kota Singkawang	1.816.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang
2.16.03.2.02.15	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	26.250.000,00			20 Lap	32.139.200,00	Singkawang	APBD KOTA	DAERAH	Pemerintah Kota Singkawang	125.000.000,00	Dinas Komunikasidan Informatika Kota Singkawang
2.16.03.2.02.18	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	63.000.000,00			1 Dok	3.816.560,00	Singkawang	APBD KOTA	DAERAH	Pemerintah Kota Singkawang	73.000.000,00	Dinas Komunikasidan Informatika Kota Singkawang
2.16.03.2.02.19	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	100.000.000,00			3 dok	27.562.500,00	Singkawang	APBD KOTA	NASIONAL	Pemerintah Kota Singkawang	30.000.000,00	Dinas Komunikasidan Informatika Kota Singkawang
2.16.03.2.02.20	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana	105.000.000,00			3 Aplikasi	19.975.520,00	Singkawang	APBD KOTA	DAERAH	Pemerintah Kota Singkawang	73.000.000,00	Dinas Komunikasidan Informatika Kota Singkawang

	SPBE pemerintah daerah	SPBE pemerintah daerahPemerintah Daerah											
2.16.03.2.02.24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	63.000.000,00			30 PD	752.287.733,00	Singkawang	APBD KOTA	NASIONAL	Pemerintah Kota Singkawang	1.400.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang
2.16.03.2.02.27	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas				2 Prog	32.488.570,00	Singkawang	APBD KOTA	DAERAH	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang	115.000.000,00	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah Yang Data Sektoralnya Terintegrasi Dengan Website	200.000.000,00			100%	178.537.452,00	Singkawang	APBD KOTA	NASIONAL	Pemerintah Kota Singkawang	240.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Data Statistik Kota Singkawang	200.000.000,00			100%	178.537.452,00	Singkawang	APBD KOTA	NASIONAL	Pemerintah Kota Singkawang	240.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang
2.20.02.2.01.07	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	15.000.000,00			6 Orang	50.000.000,00	Singkawang	APBD KOTA	NASIONAL	Pemerintah Kota Singkawang	110.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang
2.20.02.2.01.08	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik	20.000.000,00			100%	128.537.452,00	Singkawang	APBD KOTA	NASIONAL	Pemerintah Kota Singkawang	130.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang

		untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan											
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah Yang Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	175.000.000,00			100%	100.000.000,00	Singkawang	APBD KOTA	NASIONAL	Pemerintah Kota Singkawang	110.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang
2.21.02.2.01	Penyelenggaraa n Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase Penyelenggaraa n Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	175.000.000,00			100%	100.000.000,00	Singkawang	APBD KOTA	NASIONAL	Pemerintah Kota Singkawang	110.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	20.000.000,00			1 dok	25.000.000,00	Singkawang	APBD KOTA	NASIONAL	Pemerintah Kota Singkawang	50.000.000,00	Dinas Komunikasidan Informatika Kota Singkawang
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis	55.000.000,00			1 Lap	75.000.000,00	Singkawang	APBD KOTA	NASIONAL	Pemerintah Kota Singkawang	60.000.000,00	Dinas Komunikasidan Informatika Kota Singkawang

	Non Elektronik	Elektronik dan Non Elektronik											
												0	
												10.853.981.718,00	
												0	
												10.853.981.718,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2025 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pelayanan publik.


Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2023-2026. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2025 merupakan implementasi program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2023-2026 yang terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2025 sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Program kegiatan yang ditetapkan dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika harus sama dengan yang tertuang dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai pentahapannya, sedangkan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Diharapkan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2025 ini akan dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Singkawang, 7 Mei 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Singkawang


ECAN ERNANDA, S. Kom

Pembina Tk. I

NIP. 19710312 200502 1 001



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Ahmad Yani Nomor 76 Singkawang Kode Pos 79123

Telp. (0562) 4203158 Fax. (0562) 4203158

Email : diskominfo@singkawangkota.go.id Website :

www.kominfo.singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG
TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1868);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2 No. Reg. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat: 2-75/2019);
18. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 51);
21. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Singkawang Tahun 2022-2024 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 80);

22. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026;
23. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang;
24. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang;
25. Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 061/492/SETDA.OR-A Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub-Subtansi dan Sub Koordinator di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- | | |
|---------|--|
| KESATU | Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. |
| KEDUA | Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan, mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang. |
| KETIGA | Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini, Tim Penyusun Rencana Kerja bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang. |
| KEEMPAT | Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2024. |
| KELIMA | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 2 Mei 2024

Kepala Dinas



EVAN ERNANDA, S.Kom

Pembina Tk. I

NIP. 19710312 200502 1 001

Tembusan :

1. Wali Kota Singkawang;
2. Wakil Wali Kota Singkawang;
3. Sekretaris Daerah Kota Singkawang;
4. Kepala Bappeda Kota Singkawang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG
NOMOR : 36 TAHUN 2024
TANGGAL : 02 MEI 2024

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG
TAHUN ANGGARAN 2025

No	JABATAN PADA OPD	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris	Ketua
3.	Kasubbag Program, Keuangan dan Asset	Sekretaris/Koordinator
4.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Anggota
5.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	Anggota
6.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	Anggota
7.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Fungsional Umum di Subbag Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal Mei 2024
Kepala Dinas



ERWIN ERNANDA, S.Kom
Pembina Tk. I
NIP. 19710312 200502 1 001